

## PENGARUH PAD, DAU, BELANJA MODAL, BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Ema Nur Indah Fitriyani<sup>1\*</sup>, Agus Endro Suwarno<sup>2</sup>

\*Email : [fitriya.ema123@gmail.com](mailto:fitriya.ema123@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to determine the effect of local revenue, general allocation funds, capital expenditure and personnel expenditure on the level of regional financial independence in districts / cities in Central Java province. This research is a quantitative study using secondary data. The population in this study were all regions / cities in the province of Central Java from 2016 to 2018. To obtain samples from 35 districts / cities, the sample in this study was taken using purposive sampling. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis as measured by the SPSS version 23 application tool. The results show that the effect of local revenue and general allocation funds on the level of regional financial independence is 0,000 and the effect of capital expenditure on the level of regional financial independence. amounting to 0.046 while personnel expenditure has no effect on the level of regional financial independence because it has a significance value greater than 0.05, which is equal to 0.211.*

**Keywords:** *Regional Original Income, General Allocation Funds, Capital Expenditures, Employee Expenditures, Level of Regional Financial Independence.*

**Abstrak.** Penelitian ini memiliki tujuan agar mengenal pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Populasi didalam penelitian yaitu seluruh kabupaten atau kota pada provinsi Jawa Tengah mulai 2016 hingga 2018. Untuk mendapatkan sampel dari 35 kabupaten/kota, maka sampel didalam penelitian menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang dimanfaatkan didalam penelitian ini merupakan analisis regresi linier berganda yang diukur dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 23. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah serta dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,000 dan pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,046 dan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena memiliki nilai signifikansi yang lebih tinggi dari 0,05 yaitu sebesar 0,211.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

### **Pendahuluan**

Di era reformasi ini masyarakat banyak menghendaki pemerintah terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik. Ini dikarenakan pemerintah daerah masih belum bisa menata dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Dapat dilihat dari daerah yang masih bergantung pada subsidi dari pemerintah seperti dana alokasi umum (DAU) daripada berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan kemampuan daerah dalam pendanaan daerah (Abdullah, dkk, 2015). Dengan disahkannya TAP MPR No XV/MPR/ 1998 ialah mengenai “Penyelenggaraan otonomi daerah, regulasi, distribusi, serta pemanfaatan energi nasional secara adil dalam kerangka NKRI, serta praktik perimbangan fiskal pusat dan daerah.” Diharapkan bisa tingkatkan kesejahteraan warga. Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan wilayah “ Otonomi Daerah ialah kewenangan, kewajiban serta hak wilayah otonom untuk mengendalikan serta mengurus urusan pemerintah serta kepentingan umum sesuai dengan persyaratan resmi.” Tujuan diberlakukannya otonomi daerah semacam ini agar mendapatkan kemandirian wilayah (Sari, 2015).

Kemandirian keuangan daerah merupakan kekuatan suatu daerah yaitu pemerintah menyediakan dana swadaya untuk kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan yang diberikan oleh warga yang telah membayar dan memungut pajak (Halim, 2008: 232). Besaran PAD yang diterima dari masing-masing daerah dan dana yang dimotori pemerintah contohnya dana alokasi umum (DAU) yang dipergunakan sebagai mengalokasikan belanja daerah, baik belanja modal semacam belanja tanah, bangunan, serta asset tetap yang lain juga belanja operasional misalnya belanja pegawai, belanja barang dan lain sebagainya. Bagi PP No 71/2010, belanja modal mengacu pada pengeluaran rumah tangga untuk pembelian asset tetap serta asset yang lain yang bisa menciptakan keuntungan selama lebih dari satu tahun. Belanja modal seperti belanja tanah, perlengkapan, bangunan, jalur serta asset tetap yang lain. Masyarakat mengharapkan anggaran yang digunakan untuk perbaikan sarana umum harusnya lebih besar namun pada kenyataannya anggaran yang lebih besar digunakan pada belanja pegawai berbentuk gaji serta tunjangan. Belanja pegawai ialah segala bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai kompensasi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang dan komoditas yang tersedia untuk pegawai negeri. Kompensasi ini diberikan oleh pemerintah sebagai reward atas pekerjaan yang telah dilaksanakan (Wahyuni & Ardini, 2018).

Penelitian terkait dengan tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak di jalani dan memberikan hasil yang beragam. Penelitian (Kustianingsih, 2018) menunjukkan jika PAD berdampak positif terhadap kemandirian keuangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian Haryanto (2019) menunjukkan jika PAD berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat pula riset terkait pengaruh antara DAU dengan kemandirian keuangan daerah. Riset Haryanto (2019) menyatakan jika DAU berdampak negative terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Riset Ayu (2013) menunjukkan jika DAU berdampak negatif dalam kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau wilayah di Provinsi Lampung.

Selain mengkaji pengaruh DAU dengan kemandirian keuangan, terdapat pula penelitian terkait dengan pengaruh antara belanja modal dan kemandirian keuangan daerah. Riset Haryanto (2019) menunjukkan jika belanja modal tidak mempunyai pengaruh dalam kemandirian keuangan daerah kepada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Sari (2015) menyatakan jika belanja modal berdampak positif dalam kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota di DIY. Terdapat pula riset terkait pengaruh antara belanja pegawai dengan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian (Darwis, 2015) menyatakan jika belanja pegawai berdampak negatif dalam kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Perihal tidak sejalan dengan penelitian (Simatupang, 2016) menunjukkan jika belanja pegawai tidak mempunyai pengaruh dalam kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Dari penjabaran latar belakang diatas, menunjukkan bahwa hasil riset berbeda dari berbagai daerah atau wilayah mendukung peneliti agar melakukan riset yang serupa yakni mengenai **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH ( Riset Empiris Pada Kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016- 2018).**

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu apabila data terkumpul disajikan dalam bentuk data kuantitatif dan diolah dengan menggunakan metode statistik, merupakan metode untuk mengamati perilaku manusia yang dapat diprediksi dan realitas sosial, bersifat objektif, dan bias (Yusuf, 2014:52). Dalam penelitian ini peneliti mengamati variabel terikat (Y) berupa Tingkat kemandirian keuangan daerah serta empat variabel bebas yakni PAD (X1), DAU (X2), Belanja modal (X3) serta Belanja pegawai (X4).

Populasi dalam riset ini yakni semua kabupaten / wilayah di Provinsi Jawa Tengah sepanjang era 2016 - 2018 dengan total 35 wilayah yang merupakan 29 kabupaten serta 6 kota. Adapun metode yang digunakan didalam pengambilan sampel yaitu memakai purposive sampling. Pertimbangan pada riset ini yakni: semua kabupaten atau wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang menyajikan LRA APBD secara lengkap pada periode 2016-2018. Periode penelitian dipilih tida tahun karena itu merupakan informasi terkini yang dapat diperoleh.

Jenis data di dalam riset ini ialah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang terkumpul melalui lembaga pengumpul informasi yang diterbitkan para pengguna jasa (Yulianto & Maskan 2018:37) Sumber data yang dipergunakan dalam riset ini ialah data sekunder berdasarkan Laporan Realisasi APBD pada wilayah pusat atau kota Provinsi Jawa dari periode 2016 hingga 2018 yang didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan( BPK) Provinsi Jawa Tengah ataupun bisa diakses lewat web [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan( DJPK).

Pengumpulan data dalam riset ini melalui dokumentasi, ialah cara pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis ataupun literature (Mardawani, 2020:59). Tidak hanya itu peneliti melaksanakan riset kepustakaan lewat buku serta jurnal terkait kasus yang lagi diteliti

Pendapatan Asli Daerah adalah pemasukan daerah yang dihasilkan dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya dari pengelolaan kekayaan asli daerah serta peran warga dalam membayar pajak serta retribusi daerah (Marizka, 2013) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah yakni:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum yaitu anggaran APBN yang diserahkan pemerintah wilayah selaku dana sokongan ataupun dana dorongan dalam upaya untuk membangun sarana dan prasarana daerah supaya tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Menurut (Marizka, 2013) pengukuran DAU dapat dilakukan dengan memandang kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah yakni:

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum (DAU)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Belanja modal yaitu pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah yang berbentuk aset tetap ataupun persediaan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Menurut (Darwis, 2015) Belanja modal bisa dihitung melalui rasio belanja modal yakni:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja pegawai yaitu pembelian yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji maupun tunjangan. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pengukuran belanja pegawai dapat dihitung dengan rasio belanja pegawai, yakni:

$$\text{Rasio Belanja Pegawai} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan daerah merupakan kekuatan suatu daerah yaitu pemerintah menyediakan dana swadaya untuk kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan yang diberikan kepada penduduk (Halim, 2008:232) tingkat kemandirian keuangan daerah ini bisa dihitung melalui rumus:

$$\text{TKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Bantuan Pemerintah}} \times 100\%$$

Metode analisis didalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 23 untuk melakukan regresi linier berganda serta pengujian hipotesis klasik. Ini digunakan agar menganalisis berhubungan pajak daerah, alokasi dana umum, belanja modal serta belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah.

## Hasil dan Pembahasan

### Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang diteliti didalam riset merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sampel sejumlah 35 daerah di Provinsi Jawa Tengah termasuk 105 observasi. Namun, sebanyak 18 data harus dikurangi karena secara statistik sudah terkonfirmasi sebagai data outlier sehingga total sampel yang dipergunakan didalam penelitian sebanyak 87 sampel dari tahun 2016-2018.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah statistik yang dipergunakan dalam analisis data melalui melihat nilai rata-rata, standar deviasi, minimum serta maksimum agar menggambarkan informasi yang dikumpulkan. Dalam riset ini, hasil uji statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 1 seperti berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PAD	87	9.22	23.48	15.8632	2.96502
DAU	87	40.42	53.77	47.1948	3.18914
Belanja Modal	87	9.68	29.06	18.4802	3.92868
Belanja Pegawai	87	33.94	52.42	42.9884	4.12496
Tingkat Kemandirian	87	12.86	38.15	25.2325	5.36348
Keuangan Daerah	87	12.86	38.15	25.2325	5.36348

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

### Uji Normalitas

Untuk mengenal adakah model regresi data yang telah dipakai sudah sesuai atau tidak. Dalam riset ini, uji CLT dipakai sebagai penguji normalitas. CLT (Central Limit Theorem) yaitu jika ukuran sampel yang digunakan lumayan besar ( $n > 30$ ), hingga sampel dapat dikatakan terdistribusi normal (Gujarati, 2015) penelitian ini memiliki jumlah sampel 87, maka dapat dianggap terdistribusi normal karena jumlah ( $n > 30$ ).

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas di manfaatkan untuk mengenal apakah suatu data memiliki multikolinieritas berdasarkan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF lebih besar dari 10 dan toleransinya lebih kecil dari 0,10 menunjukkan adanya gejala multikolinieritas.

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Kesimpulan
PAD	0,957	1,045	Tidak Ada Multikolinieritas
DAU	0,738	1,354	Tidak Ada Multikolinieritas
Belanja Modal	0,871	1,148	Tidak Ada Multikolinieritas
Belanja Pegawai	0,661	1,513	Tidak Ada Multikolinieritas

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

Dapat dilihat dari tabel 2. nilai VIF dari (PAD) yakni 1,045, nilai VIF dari (DAU) yakni 1,354, nilai VIF dari Belanja Modal yakni 1,148 dan nilai VIF dari Belanja Pegawai yakni 1,513. Nilai VIF dari tiap variabel tidak lebih besar dari 10, jadi dapat mengindikasikan tidak adanya gejala multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimanfaatkan agar mengenalkan ada tidaknya varian residual diantara observasi dengan observasi lainnya didalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu model yang tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang dimanfaatkan pada penelitian ini merupakan uji gletser.

**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Kriteria	Nilai Sig	Kesimpulan
PAD	>0,05	0,209	Tidak Ada Heterokedastisitas
DAU	>0,05	0,290	Tidak Ada Heterokedastisitas
Belanja Modal	>0,05	0,230	Tidak Ada Heterokedastisitas
Belanja Pegawai	>0,05	0,825	Tidak Ada Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3. menampilkan jika nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni 0,209, nilai signifikansi Dana Alokasi Umum (DAU) yakni 0.290, nilai signifikansi Belanja Modal yakni 0,230, dan nilai signifikansi Belanja Pegawai yakni 0,825. Dapat dilihat jika nilai signifikansi dari setiap variabel > 0,05. Hingga terindikasi bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan agar mengenal adakah suatu model regresi masih terdapat ikatan diantara residual dalam periode t serta residual dalam periode t sebelumnya. Model regresi yang baik merupakan metode yang tidak terdapat gejala autokorelasi. Uji autokorelasi yang dipakai pada riset ini merupakan uji Durbin-Watson (D-W).

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.971 <sup>a</sup>	.943	.940	1.31668	1.223

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

Pada tabel 4. memperlihatkan jika nilai Durbin-Watson (D-W) pada model regresi yakni 1,223 sehingga nilai Durbin-Watson terletak diantara -2 dan +2, hingga bisa diindikasikan sehingga model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

### Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dengan pengolahan SPSS ditunjukkan pada Tabel 5:

**Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.643	2.603		5.625	.000
	PAD	1.676	.049	.926	34.236	.000
	DAU	-.260	.052	-.154	-5.011	.000
	Belanja Modal	-.078	.039	-.057	-2.027	.046
	Belanja Pegawai	-.053	.042	-.041	-1.261	.211

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

Dari model regresi linier berganda diatas bisa dijabarkan dalam persamaan seperti:

$$Y = 14,643 + 1,676 X_1 - 0,260 X_2 - 0,078 X_3 - 0,053 X_4 + e$$

### Uji T

Uji t dimanfaatkan agar mengkaji hubungan variabel independen dalam variabel dependen. Hasil uji-t yang diperoleh dari setiap variabel dapat terlihat pada Tabel 6 seperti berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji T**

Variabel	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
PAD	34,236	1,989	0,000	H <sub>1</sub> Diterima
DAU	-5,011	1,989	0,000	H <sub>2</sub> Diterima
Belanja Modal	-2,027	1,989	0,046	H <sub>3</sub> Diterima
Belanja Pegawai	-1,261	1,989	0,211	H <sub>4</sub> Ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Dari Tabel 6 dapat terlihat nilai efektif PAD 0,000 < 0,05 (nilai t hitung 34,236), sehingga Ho ditolak serta H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan tersebut pendapatan daerah berhubungan positif signifikan dari tingkat kemandirian keuangan daerah di berbagai daerah atau kota di Jawa Tengah. Hasil tersebut sejalan dengan Haryanto (2019) yang menjelaskan bahwa pajak daerah berhubungan positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi atau wilayah di Jawa Tengah.

### Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dari Tabel 6 terlihat bahwa nilai signifikansi DAU 0,000 < 0,05, dan nilai t hitung - 5,011, sehingga Ho ditolak dan H2 diterima. Artinya dari hasil tersebut, penyaluran dana secara umum akan berdampak negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam berbagai daerah atau wilayah di Jawa Tengah. Hasil ini sama dengan Kustianingsih (2018) yang menunjukkan bahwa penyaluran dana secara normal memiliki dampak negative dari kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Tengah.

### Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dari tabel 6 terlihat nilai signifikan belanja modal 0,046 < 0,05 nilai t hitung sebesar - 2,027 sehingga Ho ditolak serta H3 diterima. Sehingga dari hasil tersebut belanja modal mempunyai hubungan yang signifikan negatif dari tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Ini sama dengan Darwis (2015) yaitu belanja modal memiliki hubungan yang signifikan negative terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

### Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Ke mandirian Keuangan Daerah

Dari tabel 6 terlihat nilai signifikan belanja pegawai 0,211 > 0,05 t hitung sebesar - 1,261 sehingga Ho diterima dan H4 ditolak. Sehingga dari hasil tersebut belanja pegawai tidak ada hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi atau kota di Jawa Tengah, ini sama dengan menurut Simatupang (2016) bahwa pembelanjaan pegawai tidak ada berhubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah. di Malaysia Tengah. Suatu daerah atau kota di Sumatera bagian utara.

### Uji F

Uji F dilakukan agar menguji apa variabel bebas yang termasuk didalam regresi memiliki hubungan yang sama terhadap variabel yang terikat. Hasil uji F terlihat dari Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2331.797	4	582.949	336.258	.000 <sup>b</sup>
Residual	142.158	82	1.734		
Total	2473.955	86			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

Berdasarkan uji F nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  jadi semua variabel independen bersamaan mempunyai hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Seperti diketahui nilai F hitung sebesar  $336,258 > F$  tabel 2,482, sehingga PAD, DAU, belanja modal dan belanja pegawai memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi / wilayah Jawa Tengah secara bersamaan.

### Koefisien Determinasi (adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi dimanfaatkan supaya mengetahui keahlian model regresi didalam menjelaskan variabelnya. Dari nilai Adjusted R<sup>2</sup> pada model ringkasan dapat diketahui koefisien determinasi, dan koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (adjusted R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.971 <sup>a</sup>	.943	.940	1.31668

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

Dari uji regresi diatas menyatakan nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,943 /94,3%. Artinya, 94,3% kemandirian keuangan daerah dijabarkan dari variabel seperti pendapatan daerah, alokasi umum dana, belanja modal, dan belanja pegawai. Pada saat yang sama, faktor-faktor lain kecuali model regresi menjelaskan 5,7%.

### Simpulan

Berdasarkan riset serta pembahasan mengenai pendapatan daerah, dana alokasi umum, belanja modal serta belanja pegawai provinsi atau wilayah Jawa Tengah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa: (1) Hasil riset menampilkan bahwa variable pendapatan daerah, dana alokasi umum, belanja modal, serta belanja pegawai berhubungan secara bersamaan mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. (2) Pendapatan asli bersignifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga semakin besar pendapatan asli daerah, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Karena jika PAD yang dihasilkan tinggi maka daerah tersebut dapat membiayai kebutuhannya sendiri sehingga akan mengurangi dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. (3) Dana alokasi umum berhubungan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya semakin besar dana alokasi umum yang dibagikan pemerintah kepada salah satu daerah maka semakin

kecil pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. (4) Belanja modal berhubungan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. jika belanja modal digunakan untuk belanja fasilitas publik maka akan membuat kemandirian suatu daerah menurun karena adanya pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah dalam membiayai kebutuhannya. (5) Belanja pegawai tidak memiliki hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga setiap peningkatan ataupun penurunan belanja pegawai tidak berhubungan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah., Dwi Asmawanti, dan F. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ilmiah*, 41(3), 68–70.
- Ayu, A. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (2013-2016). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Imam, G. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Haryanto, A. F. A. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Mardawani, M. pd. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. CV Budi Utama.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di sumatera barat (tahun 2006-2011). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Sari, P. I. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). *Artikel*, 13.
- Simatupang, F. F. (2016). Pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Time*.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *E-ISSN : 2460-0585*, 7.
- Yulianto, Nur Achmad Budi & Maskan, Mohammad, dkk. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. POLINEMA PRESS.
- Yusuf, P. D. A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.